

DINAMIKA KEMISKINAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Muhammad Lukman Hakim
Universitas Teknologi Yogyakarta
lukmanhakimm089@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Sleman, meskipun telah diterapkan berbagai program pemberdayaan dan kebijakan sosial, angka kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Penurunan kemiskinan yang belum optimal menciptakan kesenjangan antara tujuan pembangunan dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori pemberdayaan masyarakat dan teori pembangunan manusia (human development) untuk memahami dinamika kemiskinan dan peran pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengembangan masyarakat, berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika kemiskinan di Kabupaten Sleman dan merekomendasikan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Manfaatnya adalah menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dan stakeholder untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Pembangunan Daerah.

ABSTRACT

Regional development is a critical element in improving the quality of life, especially in developing countries like Indonesia. One of the primary indicators for assessing development success is the poverty rate. In Sleman Regency, despite the implementation of various empowerment programs and social policies, the poverty rate continues to fluctuate significantly. The suboptimal reduction in poverty has created a gap between development goals and the social realities faced by the community. This study adopts the community empowerment theory and human development theory to understand the dynamics of poverty and the role of empowerment in enhancing welfare. Using a descriptive approach with both qualitative and quantitative methods, this research analyzes the factors influencing poverty and community development, focusing on social, economic, and educational aspects. Additionally, this study evaluates the effectiveness of the empowerment programs implemented by the Sleman Regency Government. The findings of this research are expected to provide new insights into the dynamics of poverty in Sleman Regency and recommend more effective policies to alleviate poverty. This study is beneficial for policymakers and stakeholders by providing essential information to design more targeted poverty alleviation programs

Keywords: Community Empowerment, Poverty, Regional Development.



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan elemen Penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah tingkat kemiskinan, yang mencerminkan sejauh mana kesejahteraan masyarakat tercapai (Budhijana, 2019). Di Kabupaten Sleman, meskipun telah diterapkan berbagai program pemberdayaan dan kebijakan sosial, angka kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi yang signifikan, seperti yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS Sleman, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang belum sepenuhnya teratasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut, meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perkembangan indikator kemiskinan seperti garis kemiskinan dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial yang kompleks, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata (Fitri et al., 2021). Di Kabupaten Sleman, meskipun IPM meningkat, angka kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi yang mencolok,

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan hasil yang diinginkan (Noerizza Triananta & Purnomo, 2023). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan yang mungkin belum terjelaska.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan daerah yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh (Pramudyo et al., 2018) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini didukung oleh (Suryana, 2020), yang berpendapat bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun potensi manusia dan harus berkontribusi pada perubahan sosial dan pembangunan nasional, yang relevan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sebuah studi oleh (Saptatiningsih et al., 2015) juga menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang, tantangan terbesar terletak pada ketidaksiapan masyarakat dalam mengimplementasikan



keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks ekonomi lokal. Selain itu, penelitian oleh (Sarjito, 2023) juga mengungkapkan bahwa dinamika kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh kurangnya integrasi antara program pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial.

Untuk menjawab celah keilmuan yang ada, yaitu kurangnya analisis mendalam mengenai efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sleman. Meskipun banyak program yang telah dijalankan, belum ada kajian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program-program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dan memberikan wawasan baru tentang dinamika kemiskinan di Kabupaten Sleman serta efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Human Development (Ismail, 2015), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan akses terhadap pendidikan serta layanan dasar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. Teori ini memberikan

dasar untuk menganalisis hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kemiskinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kemiskinan di Kabupaten Sleman dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi program-program pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan stakeholder di Kabupaten Sleman dalam merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif (Firmansyah & Masrun, 2021), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Sleman. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai situasi sosial, sedangkan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.



Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tersedia. Dalam hal ini, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan dan IPM Kabupaten Sleman, yang mencakup data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan indikator-indikator dalam IPM seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.
2. Data Primer: Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan masyarakat setempat untuk mendapatkan pandangan dan informasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan staff Dinas Sosial Kabupaten Sleman, untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial-ekonomi dan kebijakan yang ada. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis dokumen atau laporan resmi, seperti data dari BPS yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengembangan masyarakat. Peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan interaksi sosial masyarakat di Sleman.

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data wawancara dan hasil observasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel sosial yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sleman. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di daerah tersebut. Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, yang dianalisis secara statistik untuk mengukur hubungan antara variabel sosial-ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman sebagai upaya memahami dinamika



kemiskinan dan pemberdayaannya. Dengan fokus pada indikator-indikator utama, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tingkat kemiskinan serta bagaimana intervensi yang tepat dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Indikator yang dianalisis meliputi aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah indikator untuk mengukur kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan. Berdasarkan data, terdapat peningkatan signifikan dalam garis kemiskinan dari Rp 334.406 pada tahun 2016 menjadi Rp 450.763 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan biaya kebutuhan dasar masyarakat, yang dipengaruhi inflasi, terutama di sektor pangan dan Pusat Statistik (BPS), yaitu *Umur Harapan Hidup (UHH)*, *Harapan Lama Sekolah*

barang pokok. Namun, pada tahun 2023, garis kemiskinan turun menjadi Rp 391.652, kemungkinan akibat stabilisasi ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan upaya pemerintah menjaga harga dan inflasi. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode tersebut. Pada 2016, terdapat sekitar 96,63 ribu penduduk miskin (8,21% dari total populasi), sementara pada 2023 jumlah ini menurun menjadi 97,50 ribu (7,52% dari total populasi). Penurunan ini, meskipun kecil, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia menurut Dimensi Penyusunnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Ketiga dimensi ini dapat diukur melalui empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh Badan *(HLS)*, *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*, dan *Pengeluaran Per Kapita*.

Tabel 1. Data Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman (2016-2023)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	334.406	96,63	8,21
2017	352.331	96,75	8,13
2018	370.127	92,04	7,65
2019	382.868	90,17	7,41
2020	411.610	99,78	8,12



Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	422.933	108,93	8,64
2022	450.763	98,92	7,74
2023	391.652	97,50	7,52

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel 1, data dari tahun 2020 hingga 2023, keempat indikator tersebut menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. Berikut adalah analisis lebih rinci untuk setiap indikator.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan bagi seseorang sejak lahir. Di Kabupaten Sleman, data menunjukkan adanya peningkatan bertahap setiap tahunnya dari 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 74,97 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 75,09 tahun pada 2021. Pada 2022, angka ini kembali naik menjadi 75,17 tahun, dan pada 2023

mencapai 75,26 tahun. Peningkatan UHH ini menggambarkan kemajuan dalam layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, serta adanya perhatian terhadap program kesehatan preventif. Hal ini mungkin disebabkan oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan penyuluhan tentang hidup sehat. Dengan UHH yang terus meningkat, diharapkan kualitas hidup masyarakat Sleman dapat semakin baik di masa mendatang.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur ekspektasi jumlah tahun yang dihabiskan anak-anak dalam pendidikan formal. Indikator ini penting untuk menilai potensi pendidikan dan keterampilan yang dapat dimiliki oleh generasi muda.

Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Dimensi Penyusunnya di Kabupaten Sleman (2020-2023)

Dimensi	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.97	75.09	75.17	75.26
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	16.73	16.74	16.76	16.77
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.91	10.92	10.94	11.01
Pengeluaran Per Kapita	Rp 000	15,926	16,060	16,438	16,976
IPM		83.92	84.08	84.40	84.86

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel 2, di Kabupaten Sleman, HLS menunjukkan kestabilan yang relatif tinggi dengan sedikit

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, HLS tercatat sebesar 16,73 tahun dan mengalami sedikit peningkatan



menjadi 16,74 tahun pada 2021. Kemudian, HLS naik menjadi 16,76 tahun pada 2022 dan mencapai 16,77 tahun pada 2023. Walaupun peningkatannya tidak besar, tren ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan serta upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Dengan tren positif ini, diharapkan generasi muda di Kabupaten Sleman dapat lebih berdaya saing dan memiliki pendidikan yang lebih baik.

c. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata pengeluaran tiap individu dalam setahun, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Data menunjukkan adanya peningkatan dari Rp 15,926 ribu pada 2020 menjadi Rp 16,060 ribu pada 2021. Peningkatan ini berlanjut hingga 2022 dan 2023, dengan nilai masing-masing Rp 16,438 ribu dan Rp 16,976 ribu. Kenaikan pengeluaran per kapita ini menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat yang kemungkinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di Kabupaten Sleman. Peningkatan ini juga bisa menggambarkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mereka

mampu membelanjakan lebih untuk kebutuhan hidup. Faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah stabilitas ekonomi dan berbagai program peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Pengeluaran per kapita yang lebih tinggi juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lebih baik, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan

PEMBAHASAN

Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan terintegrasi untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menunjukkan bagaimana program-program pemerintah Kabupaten Sleman mampu memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Kabupaten Sleman memiliki kondisi ekonomi yang relatif rendah, yang pada dasarnya mencerminkan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat bisa menjadi indikator tingkat kesejahteraan mereka. Gambaran mengenai kondisi ekonomi di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada peta



kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta

berikut:



Gambar 1. Peta Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2020

Sumber: Dinas Sosial Kab. Sleman, 2022

Dari peta tersebut, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman bervariasi. Kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Kecamatan Seyegan, dengan persentase mencapai 13,92% atau setara dengan 2.528 rumah tangga miskin. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kecamatan Depok, dengan persentase sebesar 3,56% atau setara dengan 1.484 rumah tangga miskin (Virawan & Fitriana, 2023). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami naik-turun setiap tahunnya. Fluktuasi ini adalah hal yang umum dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Namun, yang menjadi masalah di Kabupaten Sleman adalah bahwa penurunan angka kemiskinan setiap tahun cenderung sangat kecil, sementara kenaikannya justru relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian sebelumnya (Saragih, 2015) menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan evaluasi dan pengembangan strategi jangka panjang. Peningkatan anggaran melalui APBD serta dana dari APBN dapat mendukung kesejahteraan masyarakat miskin jika diarahkan ke program produktif. Selain itu, pengembangan usaha mikro dan kecil sangat penting untuk membantu masyarakat miskin menjadi mandiri. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Bantuan jangka pendek dari pemerintah, seperti Raskin dan BLT, dinilai membantu, tetapi diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan strategis untuk penurunan kemiskinan yang signifikan.

Dimensi Ekonomi dalam Peningkatan IPM



Peningkatan pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan adanya tren positif dalam pengeluaran per kapita di Kabupaten Sleman, yang meningkat dari Rp 15,926 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 16,976 ribu pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan pendapatan masyarakat, dan program-program pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan (Wijanarko & Susanti, 2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita di daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, sering kali mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kualitas hidup. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh program pemberdayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan daya beli individu.

Namun, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Premana & Marwasta, 2018) yang memfokuskan pada daerah dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, terdapat perbedaan signifikan. Meskipun ada peningkatan pengeluaran per kapita, ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Dalam penelitian tersebut, meskipun rata-rata pengeluaran meningkat, sebagian besar penduduk miskin masih terpinggirkan dan tidak mampu menikmati peningkatan tersebut. Di Kabupaten Sleman, meskipun ada kenaikan pengeluaran per kapita, perluasan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, menjadi faktor penting untuk mengatasi ketimpangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal di kabupaten/kota DIY dipengaruhi oleh PAD, DAK, dan dana keistimewaan, sementara belanja barang dan jasa dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Dana keistimewaan berpengaruh positif pada belanja modal serta belanja barang dan jasa, meskipun signifikan hanya terhadap belanja modal, dengan pengaruh yang lebih besar di kota. Dana keistimewaan belum mampu secara signifikan mengurangi ketimpangan pembangunan,



terutama mempengaruhi belanja modal yang memiliki efek berbeda antara kota dan kabupaten. Belanja modal meningkatkan PDRB per kapita di kota namun memiliki efek negatif di kabupaten, sedangkan belanja barang dan jasa lebih berpengaruh terhadap PDRB di kabupaten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa, dengan dampak yang lebih kuat di kota (Tjahjanto et al., 2024).

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan perlu diimplementasikan untuk memastikan peningkatan pengeluaran per kapita dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat:

1. Agar peningkatan pengeluaran per kapita dapat merata, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, terutama di sektor UMKM dan usaha lokal. Pelatihan keterampilan dan pemberian akses terhadap modal usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran per kapita.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan. Mengingat pentingnya sektor ekonomi lokal dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan,

program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan kerajinan lokal perlu diperkuat.

3. Fokus pada Pemberdayaan Sosial
Mengingat hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi isu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat program jaring pengaman sosial, seperti PKH dan bantuan langsung tunai, untuk mendukung masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dimensi Kesehatan dalam Peningkatan IPM

Peningkatan usia harapan hidup (UHH) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, UHH penduduk Kabupaten Sleman menunjukkan tren positif, meningkat dari 74,97 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,26 tahun pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 0,29 tahun selama periode 4 tahun, atau sekitar 0,13 persen per tahun, mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sleman semakin



memiliki harapan hidup yang lebih panjang, yang erat kaitannya dengan penurunan angka kematian dan peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran kesehatan, peningkatan fasilitas medis, serta program-program pemerintah yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemungkinan besar berkontribusi terhadap perubahan positif ini. (Mahulauw et al., 2016) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, investasi dalam sektor kesehatan sangat penting untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif, serta mengurangi angka kemiskinan. Beberapa temuan penelitian (Kusumawardana et al., 2024), terkait kepuasan layanan kesehatan di Sleman menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah, terutama dalam hal Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Data menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti waktu pelayanan, kompetensi

tenaga kesehatan, dan sikap tenaga kesehatan masih memerlukan peningkatan kualitas. Hasil ini berbanding terbalik dengan studi di wilayah lain, di mana aspek-aspek tersebut sudah dianggap memadai. Peta Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) juga menunjukkan ekspektasi rendah pada dimensi biaya, meskipun layanan Prolanis seharusnya tidak menimbulkan biaya bagi peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah. Meskipun ada tren peningkatan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dan merata, terutama untuk kelompok masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan yang ada. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk lebih memperkuat dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Sleman.

Untuk mendukung keberlanjutan dan pemerataan peningkatan UHH di Kabupaten Sleman beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil:

1. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan dan SDM Kesehatan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga medis dan paramedis. Selain itu, peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah



dengan kebutuhan tinggi akan fasilitas medis harus didorong, seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan klinik kesehatan.

2. Penyediaan Program Kesehatan Mental

Mengingat pentingnya aspek kesehatan mental dalam menentukan kualitas hidup, Kabupaten Sleman perlu memperkenalkan dan memperluas akses ke program-program dukungan kesehatan mental untuk masyarakat. Program ini akan membantu masyarakat mengatasi stres dan masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi usia harapan hidup.

Dimensi Pendidikan dalam Peningkatan IPM

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu komponen kunci dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pengetahuan dalam IPM Kabupaten Sleman menunjukkan tren yang positif selama periode 2020 hingga 2023. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator utama terus meningkat, yang mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan di wilayah ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hafsari et al., 2024) yang

menyatakan bahwa peningkatan HLS dan RLS erat kaitannya dengan kebijakan pendidikan yang proaktif, seperti program wajib belajar, subsidi pendidikan, dan pengembangan infrastruktur sekolah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Irham, 2024) Pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap kenaikan rata-rata lama sekolah akan mengakibatkan peningkatan IPM. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Pendidikan tidak hanya meningkatkan IPM secara langsung tetapi juga menciptakan efek berantai yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan sangat penting untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Terakhir, penelitian oleh (Rahmah et al., 2023) menyimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi agar dapat memberikan



dampak signifikan terhadap pembangunan manusia. Semua temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan strategis dalam pengelolaan kebijakan pendidikan, anggaran pemerintah, dan investasi untuk mencapai peningkatan yang signifikan dan merata dalam IPM. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten sleman antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memastikan program wajib belajar 12 tahun dijalankan secara efektif, termasuk dukungan pembiayaan bagi siswa dari keluarga tidak mampu melalui program beasiswa atau bantuan langsung untuk kebutuhan pendidikan.
2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan membangun atau memperbaiki fasilitas sekolah di wilayah terpencil, sehingga tidak ada anak yang terhambat akses karena jarak atau kondisi infrastruktur.
3. Melaksanakan pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa, guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era teknologi dan digitalisasi.
4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat
Menggandeng sektor swasta untuk memberikan dukungan program pendidikan, seperti pelatihan

keterampilan berbasis kebutuhan dunia kerja dan beasiswa bagi siswa berprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator kemiskinan dan pembangunan manusia dari tahun 2016 hingga 2023. Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat Sleman. Upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi. Peningkatan pengeluaran per kapita dan usia harapan hidup (UHH) yang positif menunjukkan adanya perbaikan dalam dimensi ekonomi dan kesehatan. Namun, ketimpangan ekonomi dan akses yang tidak merata di daerah terpencil masih menjadi tantangan



yang perlu perhatian lebih lanjut. Selain itu, dimensi pendidikan yang juga menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perlu didorong untuk terus inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Saran:

1. Pemerataan Akses Ekonomi: Fokus pada pengembangan UMKM dan usaha lokal di daerah terpencil, serta peningkatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Memperkuat program bantuan sosial difokuskan agar lebih menyentuh masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan sosial.
3. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan: Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan, serta pelatihan tenaga medis agar lebih dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
4. Pengembangan Pendidikan yang Inklusif: Memastikan bahwa semua anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, serta memperkenalkan literasi digital di sekolah-sekolah.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam

program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi melalui beasiswa, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha lokal.

Dengan melanjutkan dan memperluas kebijakan yang sudah ada, serta memastikan keterjangkauan untuk seluruh lapisan masyarakat, Kabupaten Sleman diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan yang ada.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Staff Dinas Sosial yang telah bersedia diwawancarai informasi yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap tahap penelitian ini. Tidak lupa pula, peneliti mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan moral. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Sleman (2024) Kabupaten Sleman Dalam Angka 2024. Sleman, BPS Sleman.
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36-44.
- Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159.
- Fitri, W., Octaria, M., Irvanaries, I., Suwanny, N., Sisilia, S., & Firnando, F. (2021). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).
- Hafsari, D. M., Asmara, K., & Paramita, V. N. (2024). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 272-282.
- Irham, F. M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 15-21. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.29272>
- Ismail, S. H. (2015). Pembangunan Insan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Human Development in National Education Philosophy). *Journal of Human Capital Development (JHCD)*, 8(2), 83-100.
- Kusumawardana, R. A., Sunjaya, D. K., Gondodiputro, S., Raksanagara, A. S., Ardisasmita, M. N., & Widjajakusuma, A. (2024). Patients Satisfaction with the Chronic Disease Management Program in Indonesia Using the Importance-Performance Matrix. *Althea Medical Journal*, 11(1), 32-38.
- Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2016). Pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122-148.
- Noerizza Triananta, M., & Purnomo, E. P. (2023). *Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman Developing One Data Policy in Public Services in Sleman Regency*. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.600>
- Pramudyo, G. N., Ilmawan, M. R., Azizah, B., Anisah, M., & Deo, Y. (2018). Inovasi kegiatan taman bacaan masyarakat (TBM). *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 4(1), 29-38.
- Premana, L., & Marwasta, D. (2018). Ketimpangan Ekonomi di Zona Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(1).
- Rahmah, N. A., Lukman, L., Pratiwi, R., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 222-234.
- Saptatiningsih, R. I., UPY, F. K. D. I. P., Tri Siwi Nugrahani, F. E. U. P. Y., Rejeki, S., & UPY, F. K. D. I. P. (2015). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN*.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal*



- Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Sarjito, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–12.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).
- Tjahjanto, D. L., Fauzi, A., & Juanda, B. (2024). Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *TATALOKA*, 26(3), 143–153.
- Virawan, N., & Fitriana, K. N. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN). *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(4), 19.
- Wijanarko, F. N., & Susanti, R. D. (2023). Peningkatan Pembangunan Ekonomi Untuk Kualitas Hidup Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *MBIA*, 22(2), 168–177.

